

Tata Birokrasi Perlu "Tangan Besi"

OLEH
HERI PRIYATMOKO, MA



Publik sontak kaget sekaligus mendongkol mendengar Bupati Klaten Sri Hartini yang sehari-hari berpenampilan alim diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang miliaran rupiah yang ditemukan di rumah dinas Sri Hartini distia. Ini mungkin terkait kekuasaan Klaten selama dua dasawarsa berada dalam lingkaran keluarga. Maklum, jika bupati kemudian menjadi "raja kecil."

Bahkan, bupati berhasil melibatkan pengepul untuk melicinkan setoran suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Bagaimana mungkin kondisi birokrasi Klaten tidak rusak dengan sikap bupati dan mental pejabatnya seperti ini.

Peristiwa memalukan itu menarik kembali busur kehidupan kolonialisme yang pernah terbentang jauh di belakang. Bukan gara-gara digempur bertubi-tubi oleh raja lokal, raksasa VOC ambruk sendiri lantaran para pejabatnya korup bertahun-tahun. Korupsi berkecambah laksana monster menggerogoti daging manusia yang sudah lama lumpuh. Gubernur Jenderal Marsekal Herman Willem Daendels (1808-1811) berupaya membunuh "monster" mengerikan era kolonial Belanda. Kendati masa berkuasanya pendek, wajah Hindia Belanda berhasil ditata. Daendels dijuluki Marsekal Besi, Tuan Besar Guntur, Mas Galak, atau Napoleon van Batavia karena kepemimpinannya kelewat otoriter dan bertangan besi.

Selepas menginjakkan kaki di Nusantara, Daendels geram memergoki aneka penyimpangan para birokrat. Tak mau "negara" karam, penyelewengan keuangan negara dicegah dengan merombak sistem administrasi. Sektor keuangan juga digarap serius. Dalam menerapkan regulasi keuangan, gubernur jenderal mencangkan ikat pinggang secara menyeluruh di setiap lini administrasi dan rumah tangga pemerintahan kolonial Hindia

Belanda. Pelaksanaan kebijakan ini tecermin dalam penggunaan ringgit sebagai mata uang resmi (Djoko Marihandono, 2005).

Secuil fakta penting dikabarkan ke publik, yaitu kelahiran sistem administrasi modern berupa pembentukan kantor Bendahara Umum di Batavia. Ini dianggap penting karena mencatat sirkulasi dan transaksi keuangan ne-

rika dan mengawasi keuangan lembaga lain.

Mereka diwajibkan menggelar sidang tiga kali dalam sepekan guna membahas persoalan. Setahun dua kali, institusi ini memberi laporan ke pemerintah pusat. Sekretaris Bendahara Umum menyimpan daftar laporan, buku, dan penghitungan yang diserahkan kepada Dewan Hindia sewaktu diperlukan dalam sidang. Sekretaris dibantu ajudan atau ju-

penundaan atau pemotongan kepada pemerintah pusat. Mereka bisa minta bantuan pihak terkait guna memberi penjelasan dalam surat tertutup kepada gubernur jenderal.

Dalam buku *Menjadi Indonesia* (2006), Parakriti T Simbolon menyebut, periode Daendels melahirkan banyak kejutan. Sebagus apa pun instruksi Daendels, tetap saja sukar dilepaskan dengan ke-

Demikianlah, sejarah Daendels tak selalu hitam. Ada sedikit sisi terang yang perlu diungkap. Strategi Daendels begitu manjur dalam mereformasi administrasi kolonial Belanda dan birokrasi feodal kerajaan yang dinilai tidak efektif dan subur penyimpangan. Tidak berlebihan jika periode Daendels disebut era -meminjam terminologi Peter Carey- runtuhnya tatatan Jawa. Dia



rutulis tersumpah.
Bendahara Umum

gara. Menurut kronik sejarah, pendirian kantor Bendahara Umum disahkan dalam sidang Dewan Hindia pada 23 Desember 1808. Kantor Bendahara Umum berwenang menyetujui permintaan dan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara.

Struktur kepengurusan Bendahara Umum terdiri atas seorang ketua, dibantu empat anggota dan seorang sekretaris. Saking ketatnya, mereka tak boleh merangkap jabatan lantaran aktivitas dinasnya mem-

mendengar, menyelidiki, dan membuat perhitungan individu maupun umum dari seluruh lembaga Hindia Belanda.

Bendahara Umum mulai bekerja Januari 1809, berdasarkan instruksi baru. Lembaga ini diberi daftar debitor dan kreditur negara yang musti *diblejeti*, khususnya mengenai pemisahan buku utang dan buku barang. Bendahara Umum harus jeli mengawasi borongan, pungutan, dan pajak yang dipertanggungjawabkan ke kas negara, serta melaporkan

« **Tatkala Indonesia dirundung korupsi yang tak berkesudahan, maraknya jual beli jabatan, dan bupati perempuan terang-terangan menjadi garong setelah dilantik, maka Indonesia darurat pemimpin bak Daendels yang "bertangan besi."** »

beradaan lembaga Dewan Hindia. Maka, disepakati beberapa ketentuan untuk mengatur relasi politik ini. Antara lain, gubernur jenderal perlu minta masukan Dewan Hindia dalam menetapkan keputusan dan dicetak Sebelum diterbitkan dan dilaksanakan, keputusan ditandatangani sekretaris pertama pemerintah tinggi.

Seluruh perjanjian yang disepakati bersama raja lokal atau penduduk Asia lainnya, ditandatangani dan disahkan gubernur jenderal. Dalam rangka menganyam hubungan dengan penguasa pribumi, Daendels bebas mengunjungi daerah-daerah tanpa melalui didampingi Dewan Hindia. Jika gubernur jenderal tidak aktif di Batavia, maka direktur jenderal berwenang sebagai letnan gubernur jenderal bersama anggota dewan lainnya menjalankan roda pemerintahan.

Ideal

Dapat dibayangkan gagasan perombakan sistem birokrasi di Hindia Belanda sangatlah ideal untuk ukuran dua abad silam, dan penuh keterbukaan. Bahkan, bagian dari sistem negara modern ini dapat dirasakan, yaitu realisasi keinginan politik kenegaraan pejabat tinggi di pemerintahan terkait kepentingan masyarakat luas harus sepengetahuan Dewan Hindia. Tujuannya, demi menghindari atau menjauhkan tindakan semena-mena.

merombak sistem "negara" tradisional yang telah berlangsung dan mapan selama berabad-abad.

Perombakan di segala lini, aneka pelanggaran seperti korupsi, kolusi, penyelewengan, penyelewengan, penyuaipan menurun drastis. Yang paling pokok, Daendels berhasil menata administrasi lebih sistematis dan terstruktur dalam pengaturan keuangan dan pajak negara. Pemasukan negara berupa pajak yang dikelola lembaga keuangan dikontrol sedemikian ketat dengan model pembukuan detail diikuti pemeriksaan secara berkala. Korupsi para pejabat di lembaga birokrasi negara tereduksi dan dicegah. Inilah warisan Daendels yang patut dicatat dalam panggung sejarah Indonesia.

Tatkala Indonesia dirundung korupsi yang tak berkesudahan, maraknya jual beli jabatan, dan bupati perempuan terang-terangan menjadi garong setelah dilantik, maka Indonesia darurat pemimpin bak Daendels yang "bertangan besi." Dia lincah menata birokrasi ketimbang mendapati negaranya rusak. Korupsi tak mengenal jenis kelamin. KPK juga perlu menggunakan etos kerja Daendels. Mereka harus memukul pejabat yang menggarong duit rakyat, tanpa pandang bulu. ■